

**SAAT BRITANNIA Menguasai Nusantara: Kisah Penjajahan
Inggris di Hindia Belanda**

Rosmaida Sinaga¹, Asini Rohana Silaban², Klaudia Marshanda³, Putra Rabial
Sibarani⁴, Rosi Daniela Sinambela⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

Rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹, Asinirohanasilaban79@gmail.com²,
kpakpahan886@gmail.com³, putrasibarani096@gmail.com⁴,
rosisinambela23@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study examines the short period of British colonial rule in the Dutch East Indies, especially in Java from 1811 to 1816, which began with the Tuntang Agreement and ended with the return of power to the Dutch. The problem addressed in this research is how British policies under Thomas Stamford Raffles influenced the social, economic, and political structure of Javanese society. The purpose of this study is to explain the characteristics of British colonialism in comparison to the Dutch and to analyze its impacts as a transitional phase in Indonesian colonial history. The method used is a library research with a descriptive-qualitative approach, relying on scientific journal articles as the main source. The results of this study show that British rule introduced reforms such as the land rent system, the abolition of forced labor, and indirect rule through local elites. However, these policies were not fully successful due to the lack of administrative capacity and the unpreparedness of Javanese society to adapt to a money-based economy. The conclusion is that British colonialism in Java, although short-lived, left ambivalent impacts: on the one hand, it brought liberal reforms and modernization, but on the other hand, it still burdened the people and strengthened elite dominance. This period can be regarded as an important transitional phase before the implementation of the Dutch Cultuurstelsel in 1830.

Keywords: British colonialism, Raffles, Java, land rent system, colonial history

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masa singkat kekuasaan Inggris di Hindia Belanda, khususnya di Jawa pada 1811–1816, yang dimulai dengan Perjanjian Tuntang dan berakhir dengan pengembalian kekuasaan kepada Belanda. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jawa. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan karakteristik kolonialisme Inggris dibandingkan Belanda serta menganalisis dampaknya sebagai fase transisi dalam sejarah kolonial Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan sumber utama berupa artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Inggris memperkenalkan reformasi seperti sistem sewa tanah, penghapusan kerja rodi, dan penerapan pemerintahan tidak langsung melalui elit lokal. Namun, kebijakan tersebut tidak

sepenuhnya berhasil karena keterbatasan aparatur administrasi serta ketidaksiapan masyarakat Jawa menghadapi ekonomi berbasis uang. Kesimpulannya, kolonialisme Inggris di Jawa, meskipun singkat, meninggalkan dampak ambivalen: di satu sisi membawa semangat liberal dan modernisasi, tetapi di sisi lain tetap membebani rakyat serta memperkuat dominasi elit. Periode ini dapat dipandang sebagai fase transisi penting sebelum penerapan Cultuurstelsel Belanda pada 1830.

Kata Kunci: kolonialisme Inggris, Raffles, Jawa, sistem sewa tanah, sejarah kolonial

A. Pendahuluan

Kolonialisme di Nusantara tidak hanya identik dengan kekuasaan Belanda, tetapi juga mencatat masa singkat pendudukan Inggris antara tahun 1811– 1816. Periode ini bermula dari Perjanjian Tuntang pada 1811 yang memaksa Belanda menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Sejak itu, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur dan mulai melaksanakan berbagai kebijakan kolonial. Pemerintahan Inggris di Jawa menjadi menarik untuk dikaji karena menghadirkan corak berbeda dari kolonialisme Belanda, meskipun berlangsung singkat (Setyawan, 2020).

Raffles memperkenalkan sejumlah reformasi yang disebut lebih modern dan liberal, antara lain melalui sistem sewa tanah (*landrente*) sebagai pengganti tanam paksa VOC. Ia menegaskan bahwa tanah merupakan

milik negara kolonial, sementara petani berstatus sebagai penyewa tanah yang wajib membayar pajak. Meskipun idealnya memberi kebebasan, kebijakan ini dalam praktiknya tetap memberatkan rakyat karena lemahnya aparatur pemungut pajak serta rendahnya kesiapan masyarakat Jawa dalam menghadapi ekonomi uang (Rosalina Ginting, 2011).

Di bidang politik, Raffles juga melakukan intervensi terhadap kerajaankerajaan Jawa. Peristiwa penyerangan Keraton Yogyakarta tahun 1812 yang mengasingkan Sultan Hamengkubuwana II merupakan contoh nyata bagaimana Inggris menjalankan politik *divide et impera* untuk memperkuat posisi kolonial (Irawan, 2015).

Dengan demikian, pendudukan Inggris di Jawa walau singkat, membawa perubahan penting dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik.

Masa ini juga menjadi fase transisi yang menjembatani antara kolonialisme Inggris yang relatif reformis dengan kembalinya kekuasaan Belanda pada 1816 yang kelak berujung pada sistem tanam paksa tahun 1830 (Rosmaida Sinaga, 2024)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Seluruh data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pendudukan Inggris di Hindia Belanda. Tahapan penelitian meliputi: (1) pengumpulan jurnal terkait, (2) kritik sumber untuk menilai kredibilitas dan relevansi, (3) analisis data dengan menafsirkan isi jurnal secara kritis, dan (4) penulisan hasil penelitian dalam bentuk artikel berjudul "Saat Britannia Menguasai Nusantara: Kisah Penjajahan Inggris di Hindia Belanda". Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghadirkan uraian yang sistematis, objektif, serta mampu menjelaskan dinamika kolonial Inggris di Jawa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dari Perjanjian Tuntang hingga Raffles

Masa kekuasaan Inggris di Hindia Belanda dimulai dengan peristiwa penting yang dikenal sebagai Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Perjanjian yang dilakukan di dekat Semarang ini menjadi penanda beralihnya kekuasaan di Jawa dari tangan Belanda ke Inggris. Dalam perjanjian itu, Gubernur Jenderal Janssens terpaksa menyerahkan Pulau Jawa dan seluruh daerah taklukannya kepada Inggris setelah pasukannya dikalahkan dalam invasi militer Inggris yang berlangsung antara Agustus hingga September 1811. Inggris semula datang dengan tujuan menghancurkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis di Asia Timur, namun Gubernur Jenderal Lord Minto kemudian memutuskan untuk menjadikan Jawa sebagai koloni sementara di bawah kendali Inggris (Setyawan, 2020).

Setelah perjanjian tersebut, Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur mewakili pemerintahan Inggris di Pulau Jawa. Ia segera melakukan berbagai reformasi penting, terutama dalam

bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Raffles menolak sistem tanam paksa yang selama ini diterapkan oleh Belanda karena dianggap menindas rakyat dan hanya menguntungkan pihak kolonial. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan sistem pajak tanah atau sewa tanah (*landrent*) yang terinspirasi dari kebijakan Inggris di India. Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada petani dalam menentukan tanaman yang ingin mereka tanam, tanpa adanya paksaan dari pemerintah kolonial (Setyawan, 2020).

Namun, kebijakan Raffles tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi. Dalam bidang politik, ia juga menata ulang hubungan kekuasaan di Jawa, termasuk terhadap kerajaan-kerajaan besar seperti Yogyakarta. Ia mengizinkan Sultan Hamengkubuwana II kembali naik tahta, tetapi dengan syarat harus mengakui kekuasaan Inggris dan membubarkan pasukan keraton. Penolakan Sultan terhadap syarat tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan, sehingga Inggris melancarkan serangan ke Keraton Yogyakarta pada tahun 1812. Pasukan Inggris di bawah pimpinan

Mayor Jenderal Gillespie, dengan bantuan Legiun Mangkunegaran, berhasil menaklukkan keraton dan mengasingkan Sultan Hamengkubuwana II ke Pulau Penang. Setelah itu, Raffles mengangkat Pangeran Natakusuma sebagai penguasa baru dengan gelar Pangeran Adipati Pakualaman I (Irawan, 2015).

Langkah-langkah Raffles menunjukkan bahwa Inggris secara tidak langsung menerapkan strategi politik pecah-belah (*divide et impera*) untuk memperkuat kekuasaan kolonial di Jawa. Meskipun ia membawa gagasan pemerintahan yang tampak liberal dan modern, kebijakannya tetap berorientasi pada kepentingan Inggris. Ia menegaskan bahwa seluruh tanah di Jawa merupakan milik negara kolonial, sedangkan rakyat hanya berstatus sebagai penyewa tanah yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Dalam praktiknya, sistem ini justru membebani rakyat kecil karena kurangnya aparatur pemungut pajak dan maraknya penyimpangan di tingkat lokal (Setyawan, 2020).

Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Inggris di bawah kepemimpinan Raffles menjadi salah

satu fase penting dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Walau masa kekuasaan Inggris tergolong singkat, yaitu antara tahun 1811 hingga 1816, kebijakan dan sistem yang diterapkan Raffles meninggalkan pengaruh jangka panjang, terutama dalam bidang pertanahan, administrasi, dan sistem pemerintahan kolonial. Masa transisi dari Perjanjian Tuntang hingga pemerintahan Raffles mencerminkan bagaimana Britannia mulai menanamkan pengaruh politik dan ekonomi di Nusantara, yang kelak menjadi dasar bagi pemerintahan kolonial berikutnya (Setyawan, 2020).

Kebijakan Kolonial Inggris di Jawa

Setelah Belanda melemah akibat pendudukan Prancis, Inggris mengambil alih Jawa pada tahun 1811. Thomas Stamford Raffles, yang menjabat sebagai Letnan Gubernur, memperkenalkan sistem pemerintahan dan ekonomi baru yang lebih modern. Terinspirasi oleh semangat Revolusi Prancis, ia berusaha menghapus kerja rodi serta penyerahan wajib hasil bumi yang selama ini membebani rakyat Jawa (Rosalina Ginting, 2011).

Kebijakan paling menonjol adalah sistem sewa tanah (land rent

system). Dalam kebijakan ini, tanah dianggap milik pemerintah kolonial, sedangkan petani dipandang sebagai penyewa yang wajib membayar pajak tanah. Ada tiga asas utama yang ditegakkan Raffles, yaitu: (1) menghapus semua bentuk kerja paksa dan penyerahan wajib, (2) mengubah fungsi bupati dari pemungut pajak menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji, serta (3) mewajibkan petani membayar sewa tanah kepada pemerintah (Yuliati, 2013).

Namun dalam praktiknya, sistem ini tidak berjalan sempurna. Di beberapa wilayah Jawa, pelaksanaan sewa tanah masih bercampur dengan praktik lama, bahkan penanaman paksa tetap terjadi. Selain itu, karena masyarakat Jawa belum terbiasa dengan ekonomi uang, sistem pajak individu justru memberatkan rakyat dan sering disalahgunakan oleh pejabat lokal (Rosalina Ginting, 2011).

Peralihan Kekuasaan Abad ke-19

Masa pemerintahan Inggris di Jawa relatif singkat, hanya berlangsung antara 1811–1816. Setelah kekalahan Napoleon di Eropa, Inggris harus mengembalikan wilayah jajahan Belanda berdasarkan Konvensi London 1814. Akhirnya,

pada tahun 1816, kekuasaan di Jawa resmi diserahkan kembali kepada Belanda. Peristiwa ini menandai berakhirnya eksperimen kolonial Inggris yang dipimpin Raffles dan dimulainya kembali dominasi Belanda di Nusantara (Sondarika, 2019).

Namun, Belanda yang kembali berkuasa menghadapi situasi sulit. Kondisi keuangan negeri induk dan pemerintah kolonial sangat terpuruk akibat perang yang panjang, terutama setelah berakhirnya Perang Jawa (1825–1830). Krisis ini mendorong pemerintah kolonial mencari cara baru untuk meningkatkan pendapatan (Sondarika, 2019).

Sebagai solusi, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Bagi penduduk yang tidak memiliki tanah, mereka diwajibkan bekerja sekitar 75 hari per tahun di perkebunan pemerintah. Melalui kebijakan ini, Belanda berhasil memulihkan keuangan negara dan memperoleh keuntungan besar dari hasil ekspor, tetapi beban rakyat

semakin berat (Choiruzzad, Indonesia Dijajah Lebih dari 300 Tahun? Menjelaskan Penjajahan sebagai Proses Transformasi Struktural, 2021)

Peralihan kekuasaan abad ke-19 ini menunjukkan perbedaan orientasi kolonial antara Inggris dan Belanda. Jika Inggris di bawah Raffles mencoba memperkenalkan sistem sewa tanah dengan nuansa liberal, maka Belanda kembali menegakkan pola eksploitasi yang lebih keras melalui Cultuurstelsel. Hal ini menegaskan bahwa kembalinya Belanda bukan sekadar pergantian administrasi, melainkan juga permulaan fase kolonialisme baru yang sangat menekan masyarakat Jawa.

Dengan demikian, peralihan kekuasaan abad ke-19 dari Inggris ke Belanda membawa dampak mendasar. Dari masa singkat pemerintahan Inggris yang relatif reformis, Belanda melanjutkannya dengan sistem eksploitasi besar-besaran. Kebijakan tanam paksa inilah yang kemudian meninggalkan warisan penderitaan mendalam bagi rakyat Jawa hingga dekade-dekade berikutnya (Sondarika, 2018: 64).

Dampak Sosial dan Ekonomi Pendudukan Inggris

Pendudukan Inggris di Jawa pada masa Thomas Stamford Raffles (1811– 1816) membawa perubahan besar dalam tata kelola kolonial, khususnya melalui kebijakan pajak tanah atau sistem *landrente*. Kebijakan ini menggantikan praktik tanam paksa VOC, dengan menjadikan petani sebagai penyewa tanah pemerintah dan wajib membayar pajak sesuai kualitas tanah yang digarap. Awalnya sistem ini diterapkan per-desa, namun sejak 1814 diubah menjadi pajak individu, yang justru menambah beban petani karena mereka belum terbiasa dengan sistem ekonomi uang. Selain itu, keterbatasan aparatur pajak membuat pelaksanaannya rawan penyalahgunaan, sehingga rakyat kecil sering menjadi korban pungutan yang tidak adil (Setyawan, 2020).

Bagi Inggris, *landrente* ditujukan untuk memperbaiki administrasi kolonial sekaligus mengisi kas negara. Namun, dalam praktiknya, sistem ini berjalan inkonsisten dan menimbulkan banyak penyelewengan oleh pejabat lokal. Meskipun demikian, ada beberapa dampak positif, misalnya menurunnya angka kejahatan dan meningkatnya perhatian pada bidang ilmu

pengetahuan, budaya Jawa, hingga peninggalan sejarah seperti Borobudur. Raffles bahkan memperkenalkan aturan lalu lintas kiri yang masih berlaku hingga kini (Yuliati, 2013).

Selain *landrente*, Raffles juga menerapkan beberapa kebijakan lain, seperti sistem *tribute*, yakni kewajiban setiap daerah membayar sumbangan tahunan kepada pemerintah kolonial. Walau lebih ringan daripada tanam paksa VOC, sistem ini tetap rawan penyelewengan dana di tingkat lokal. Raffles juga memperkenalkan *indirect rule*, dengan menempatkan pemimpin pribumi sebagai penguasa daerah, agar masyarakat merasa tetap dipimpin tokoh lokal. Namun, sistem ini memperkuat kedudukan elit feodal dan tidak menghapus kesenjangan sosial (Rosmaida Sinaga, 2024).

Dari sisi sosial, salah satu kebijakan penting adalah penghapusan perbudakan. Dipengaruhi semangat liberalisme dan Revolusi Prancis, Raffles menilai perbudakan sebagai sistem kuno yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Meskipun pelaksanaannya belum sempurna, kebijakan ini menjadi langkah awal

menuju pembebasan tenaga kerja dari ikatan feodal (Setyawan, 2020).

Dengan demikian, dampak sosial dan ekonomi pendudukan Inggris di Jawa bersifat ambivalen. Di satu sisi, Raffles memperkenalkan gagasan liberal, modernisasi administrasi, dan penghargaan pada ilmu pengetahuan serta budaya. Namun di sisi lain, kebijakan pajak tanah dan tribute justru membebani rakyat kecil, sementara dominasi elit lokal tetap bertahan. Masa singkat pemerintahan Inggris akhirnya meninggalkan warisan yang kelak diadopsi sebagian oleh Belanda, sebelum digantikan oleh sistem tanam paksa tahun 1830

D. Kesimpulan

Masa kekuasaan Inggris di Hindia Belanda (1811–1816) menjadi babak singkat namun penting dalam sejarah kolonial Nusantara. Melalui Perjanjian Tuntang, Inggris mengambil alih Jawa dan menempatkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur. Raffles membawa sejumlah kebijakan baru, seperti penghapusan kerja rodi, pengenalan pajak tanah (*landrente*), serta perhatian pada ilmu pengetahuan dan budaya.

Meski tampak lebih modern, kebijakan Inggris tetap berorientasi pada kepentingan kolonial. Pajak tanah justru membebani rakyat, politik pecah-belah melemahkan kerajaan lokal, dan penyalahgunaan wewenang tetap marak. Setelah Inggris pergi dan Belanda kembali berkuasa, sistem ini digantikan dengan tanam paksa yang lebih menindas. Dengan demikian, masa Inggris di Jawa adalah periode transisi: meninggalkan jejak reformasi terbatas, tetapi tidak menghapus penderitaan rakyat di bawah kolonialisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiruzzad, S. A. (2021). Indonesia Dijajah Lebih dari 300 Tahun? Menjelaskan Penjajahan sebagai Proses Transformasi Struktural. *Andalas Journal of International Studies*, 66-81.
- Irawan, Y. (2015). Legitimasi Kekuasaan dalam Karya Sastra Babad: Mimikri, Hibriditas, dan Ambivalensi dalam Babad Pakualaman. *Jumantara*, 157-172.
- Rosalina Ginting, A. S. (2011). SISTEM SEWA TANAH DALAM UPAYA PENGHAPUSAN

FEODALISME DI JAWA ABAD

XIX. Jurnal Ilmiah CIVIS, 52-57.

Rosmaida Sinaga, A. M. (2024). Kebijakan Inggris Dalam Kepemimpinan Thomas Raffles di Indonesia 1811-1816. AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation, 180-187.

Setyawan, Y. H. (2020). PERAN SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES DALAM SISTEM PAJAK BUMI DI PULAU JAWA TAHUN 1811- 1816. Karmawibangga : Historical Studies Journal, 65-76.

Sondarika, W. (2019). Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. Jurnal Artefak, 59-66.

Yuliati. (2013). DAMPAK KEBIJAKAN KOLONIAL DI JAWA. SEJARAH DAN BUDAYA, 96-102.